

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kraton Yogyakarta

Secara *de facto* dan *de jure*, perjanjian Giyanti menandai berakhirnya Kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu desa Giyanti (ejaan Belanda, sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo) sebelah tenggara Kota Karanganyar, Jawa Tengah.

Perjanjian Giyanti (1755) merupakan titik awal berdirinya Kerajaan Kasultanan Yogyakarta (Ngayogyokarto Hadiningrat). Segera setelah memperoleh wilayah Yogyakarta (setengah Kerajaan Mataram), Pangeran Mangkubumi mendirikan Kasultanan Yogyakarta dan mengukuhkan dirinya sebagai raja baru dengan nama Sri Sultan Hamengku Buwono I (HB I). Gelar lengkapnya adalah *Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga Ngaburrahman Sayidina Panata Gama Khalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping I ing Nagari Ngayogyakarto Hadiningrat Mataram* (Baskoro, 2010: 7).

Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara itu, wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi,

yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta (Kresna, 2011:124).

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan dan berhak mengatur rumah tangga sendiri. Hal ini dinyatakan di dalam kontrak politik yang tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No.47 tahun 1755. Selanjutnya, pada hari Kamis Pon, 14 Sura tahun Jimakir 1682 atau 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya mulai berkediaman tetap di Keraton Yogyakarta yang telah selesai dibangun secara bertahap.

Ibukota negeri yang baru itu dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang berarti tempat yang baik dan sejahtera, yang menjadi suri teladan keindahan semesta. Makna Yogyakarta mengungkapkan kekayaan dan keluhuran gagasan. Sebutan Hadiningrat mengisyaratkan bahwa secara konseptual, kota ini dicita-citakan agar dapat memberikan inspirasi tentang keindahan, kesempurnaan, dan keunggulan bagi seluruh negeri (Kresna: 2011:127-129).

Kerajaan dalam istilah Jawa disebut *karaton*. Menurut KRHT. Wirodiningrat, istilah karaton mencakup tujuh pengertian (*saptawedha*). *Pertama*, kerjaan. *Kedua*, kekuasaan raja. Dalam hal ini, kekuasaan raja mengandung dua aspek, yaitu aspek *staatsrechtelijk* (kenegaraan) dan *magischreligieus*. *Ketiga*, penjelmaan wahyu nurbuwat, sehingga menjadi pepunden dalam kejawen. *Keempat*, istana(kedaton) atau rumah (dhatulaya). *Kelima*, bentuk bangunan yang unik dan khas. Keunikan tersebut mengandung makna simbolik yang tinggi, yaitu menggambarkan

perjalanan jiwa menuju ke arah kesempurnaan. *Keenam*, lembaga sejarah kebudayaan (*cultuur hostorische instelling*) yang menjadi sumber sekaligus pemancar kebudayaan. *Ketujuh*, badan (*juridische instellingen*), yang berarti keraton mempunyai barang-barang yang menjadi hak milik atau wilayah kekuasaan (*bezittingen*) sebagai sebuah dinasti (Kresna, 2011:213-214).

Keraton Yogyakarta dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin yang terletak di antara Sungai Winongo dan Sungai Code. Keraton tersebut dinamakan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan selesai pembangunannya pada 7 Oktober 1756. Keraton menghadap utara ke arah gunung Merapi dengan halaman berupa Alun-alun Utara. Alun- alun utara berfungsi untuk mengumpulkan rakyat, tempat latihan perang-perangan, dan penyelenggaraan upacara adat.

Ditengah alun-alun terdapat dua buah pohon beringin yang diberi nama Kyai Dewadaru dan Kyai Wijayadaru. Di sekeliling alun-alun tumbuh 64 pohon beringin sebagai simbol usia nabi Muhammad saw. Saat wafat 64 tahun, menurut perhitungan tahun jawa.

Keraton Yogyakarta mempunyai luas 14.000 m persegi yang dikelilingi oleh beteng setinggi 4 m dan lebar 3,5 m. Di setiap sudutnya terdapat beton dan dikelilingi parit di luarnya. Dahulu terdapat lima pintu gerbang, yaitu Plengkung Nirbaya, Plengkung Jayabaya, Plengkung Jagasura, Plengkung Tarunasura, dan Plengkung Madyasura. Sekarang tinggal dua buah yaitu, Plengkung Nirbaya (Gading) dan Plengkung Tarunasura (Wijilan) (Supriyanto, 2008:52).

Keraton Yogyakarta dibangun pada jaman pemerintahan Sultan HB I, yaitu pada 1756 Masehi atau tahun Jawa 1682. Lambang Keraton berupa dua naga yang saling melilit merupakan symbol tahun pendirian Keraton Yogya. Setiap angka mengandung arti. Tahun 1682 dibaca dari belakang demikian (2= dwi, 8= naga, 6=rasa, 1=tunggal). Hebatnya, ungkapan dwi naga rasa tunggal itu dapat dibaca menjadi dwi nagara satunggal yang artinya adalah “dua negara adalah satu”. Maksudnya, meskipun Mataram Islam telah terpecah menjadi dua kerajaan, hakikatnya adalah satu (Baskoro, 2010:8).

Menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, sebuah daerah dinyatakan sebagai istimewa jika daerah itu memiliki apa yang disebut sebagai “susunan asli”. Pada bagian penjelasan dari pasal 18 ditulis demikian; “dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Susunan asli itu berbicara tentang sistem pemerintahan yang sudah ada (*established*) sebelum daerah itu menjadi bagian dari negara RI. Yogyakarta misalnya, merupakan sebuah kerajaan tersendiri sejak jauh sebelum bergabung dengan RI. Yogyakarta sudah mempunyai sistem pemerintahan tersendiri dan bahkan sudah mereorganisasi sistem tersebut (Baskoro, 2010:3).

Yogyakarta memiliki apa yang disebut dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 sebagai “asal-usul” tersendiri. Pemerintah yang ada di Yogyakarta tidak tumbuh setelah RI merdeka, tetapi memiliki asal-usul tersendiri. Yogya dinyatakan sebagai istimewa karena UUD 1945 itu “menghormati dan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Sampai pada saat kemerdekaan RI (1945), masyarakat Yogya merupakan sebuah kerajaan. Sebagian besar wilayah Yogya berada di bawah Kekuasaan Kasultanan dan sebagian kecil berada di bawah kekuasaan Kadipaten Pakualaman. Sri Sultan adalah raja Yogya, sedangkan Sri Paku Alam juga merupakan raja kecil. Sebelum kemerdekaan RI, Kadipaten Pakualaman menyatakan diri untuk bersatu kembali (*reunifikasi*) dengan Kasultanan. Dengan demikian, Sri Sultan (waktu itu Hamengkubuwana IX) dan Sri Paku Alam (waktu itu Paku Alam VIII) merupakan dwitunggal pemimpin yang berkuasa penuh atas rakyat Yogya (Baskoro, 2010:4).

Keraton Yogya yang bangunannya menempati kawasan seluas 14.000 m persegi mempunyai arti yang sangat penting. Pertama, keraton merupakan simbol eksistensi Kerajaan Mataram yang kejayaannya masyhur di jaman dulu.

Kedua, keraton atau keratuan (*ke- ratu-an*) atau dalam bahasa Jawa Kedhaton, adalah tempat tinggal raja, tempat bersemayam raja. Kalau rakyat hendak menghadap raja, mereka harus datang ke keraton ini. Pada masa silam, para wakil kawulo (rakyat) harus berbusana putih-putih dan berjemur di alun-alun keraton untuk menghadap raja (tradisi pepe).

Ketiga, keraton merupakan pusat pemerintahan politis. Wilayah kekuasaan kasultanan diklasifikasi menurut konsep lapisan konsentris trimadala praja. Lapisan terdalam yang merupakan wilayah pusat kerajaan disebut nagara. Ini adalah ibukota kerajaan yang menjadi tempat tinggal raja dan para pejabat penting. Pusat nagara adalah keraton itu sendiri. Lapisan kedua disebut wilayah nagaragung, yaitu daerah-daerah sekitar kota (ommanlanden). Lapisan ketiga disebut wilayah monoconagara, yaitu daerah-daerah yang jauh (buiten-gawesten).

Keempat, keraton adalah pusat kebudayaan Jawa. Dari sinilah kebudayaan Jawa dikembangkan, ditularkan, dan diwariskan. Keraton mempunyai ahli-ahli budaya dan para pujangga. Para raja Mataram dan kemudian para Sultan Yogya mendapat predikat sebagai raja pinandhita dan nalendra sudibyو, yaitu pencipta (kreator) kebudayaan yang produktif (Purwadi, 2007). Para Sultan bersama para “ahli adat” melahirkan gagasan-gagasan asli tentang seni, sastra, sistem sosial, sistem ekonomi, dan seterusnya.

Kelima, keraton adalah pusat kerohanian (spiritualitas). Raja adalah seorang Panata Gama atau Khalifatullah, yaitu seorang pemimpin agama. Keraton Yogya juga merupakan pusat kekuatan magis yang terhubung dengan garis lurus mistis dengan kekuatan spriritual Gunung Merapi di sebelah utara dan kekuatan spriritual Samudra Hindia (Kerajaan Nyai Roro Kidul) di sebelah selatan (Baskoro, 2010:9).

B. Kepemimpinan Jawa

Kepemimpinan seorang raja dalam kerajaan Jawa merupakan sesuatu yang sakral. Menurut Purwadi (2007), seseorang pemimpin Jawa adalah pribadi yang mendapatkan apa yang disebut sebagai wahyu cakraningrat. Karena itu, dalam tradisi kepemimpinan Mataram, seorang raja dipercaya merupakan wakil Tuhan, yang dalam pengaruh Islam kemudian disebut sebagai kalifatullah. Sri Sultan sendiri memiliki gelar tersebut.

Masih menurut Purwadi (2007), seorang raja (*ratu binathara*) mempunyai tiga macam wahyu. Pertama, *wahyu nubuwah*, yaitu wahyu yang mendudukan raja sebagai seorang wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, *wahyu hukumah*, yaitu wahyu yang menempatkan raja sebagai sumber hokum dan wewenang dari Tuhan. Ketiga, *wahyu wilayah*, yaitu wahyu yang mendudukan raja sebagai pemimpin yang memberi penerangan dan perlindungan bagi rakyatnya.

Karena itulah, maka seorang raja Jawa dianggap, dipercaya, diyakini, dan dihormati sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Karena itu pulalah seorang raja Jawa dituntut untuk benar-benar memimpin dengan baik, selalu menciptakan kesejahteraan, ketertiban dan keamanan bagi rakyatnya (berbudi *bawa leksana ambeg adil para marta*). Seorang pemimpin juga tidak boleh plin-plan dalam setiap perkataan, kebijakan, dan perbuatan yang diambilnya (*sabda pandhita ratu tan kena wola wali*) (Baskoro, 2010:115-116).

Masalah pangkat dan takhta di tanah Jawa, dalam tradisi yang senantiasa melingkupi kami, tidak bisa dilepaskan dari persoalan *wahyu*

kedhaton. *Kedhaton* berasal dari kata *datuk*. *Datuk* berarti orang tertua dalam keluarga, atau yang disepuhkan. Jadi, *wahyu kedhaton* adalah wahyu yang menentukan dipilih-tidaknya seseorang menjadi sesepuh (yang dituakan) dalam struktur pemerintahan dan kekuasaan di tanah Jawa.

Wahyu kedhaton dalam kitab-kitab Jawi sering pula disebut sebagai *wahyu keprabon* (berasal dari kata *prabu*), atau *wahyu kraton* (berasal dari kata *ratu*), atau *wahyu cakraningrat* (*cakra* adalah pusat kekuasaan; *rat* adalah jagat raya; *ning* adalah kejernihan atau kesucian. Jadi, artinya pusat kekuasaan yang suci bagi jagat raya di sekelilingnya). Ia juga disebut sebagai *wahyu makutrem* atau *makutarama*. *Makutarama* terdiri dari kata *makuta* dan *rama*. *Makuta* berarti mahkota yang dinisbahkan kepada mahkota yang disandang oleh suatu kekuasaan suci. *Rama* melambangkan kekuasaan suci (Janutama, 2012: 131-132).

Seperti Kerajaan Mataram Islam, Kraton Yogyakarta dibangun berdasarkan sudut pandang yang berakar dari kebudayaan Islam Jawa. Pandangan *kejawen* kerajaan tidak bisa dipisahkan dari pandangan masyarakat Jawa terhadap hidup dan alam semesta, yang cenderung kosmis-religijs-magis. Pengaruh pra-Islam dan Islam dalam pandangan dunia kraton ini bisa dilihat pada konsep kekuasaan, jabatan, fungsi, tugas, citra seorang raja dan kerajaan ideal telah menjadi dasar kehidupan kraton secara historis dari dulu sampai sekarang.

Kuatnya pengaruh agama Islam dalam kerajaan Mataram yang kemudian Kraton Yogyakarta membawa konsekuensi kepada suksesi kepemimpinan. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep raja Jawa masih

dipercaya memiliki kedudukan dan fungsi sebagai “raja pinandhita”. Raja merupakan penjelmaan dewa di bumi dan berkewajiban menjalankan upacara-upacara keagamaan. Sehingga muncullah istilah *agama ageing aji*, yang artinya agama adalah pakaian raja.

Konsep Islam Jawa juga tercermin dari gelar sultan, gelar tersebut memberikan penjelasan konsep dan kekuasaan di Kraton Yogyakarta. Nama *Hamengku Buwono* menunjukkan simbol dan kewenangan raja yang bertugas melayani dunia. Ada tiga makna penting di dalamnya yaitu *Hamengku*, *Hamangku*, dan *Hamangkoni*. Pertama, *Hamengku* menunjukkan tugas melindungi sesame tanpa memandang kedudukan sosial termasuk mereka yang tidak menyukainya. Kedua, *Hamangku*, menandakan sifat kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingannya sendiri, dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Ketiga, *Hamangkoni* berarti penggunaan kekuatan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di jalan Allah. *Senopati ing Ngalaga* menunjukkan sikap ksatria yang wajib menciptakan dan menjaga keseimbangan hidup, ketentraman, serta kedamaian negaranya. Sedangkan *Ngabdurrahman Sayidin Panatagama* menunjukkan sikap yang wajib menempatkan diri dalam persaudaraan Islam, dan hidup sesuai aturan agama dan kehidupan pada umumnya. Sementara *Khalifatullah* menunjukkan perilaku memimpin umat di semua bidang kehidupan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan.

Seorang raja juga harus memiliki watak *berbudi bawa laksana ambeg adil para marta* yang artinya kurang lebih adalah selalu memberikan keadilan kepada segenap rakyat. Melalui kepemimpinannya, segenap rakyat dipuaskan karena menerima keadilan. Berkaitan dengan itu, seorang raja haruslah seorang yang *gung binathara* yaitu, adil, berwatak mulia, pembela rakyat, dan pelindung rakyat.

Prinsip inilah yang membedakan Kasultanan (dan Pakualaman) dari monarki-monarki yang lainnya. Kerajaan yang berada dibawah kekuasaan seorang raja, sering kali berkembang menjadi sistem pemerintahan yang otoritarianistik. Kekuasaan raja menjadi tidak terbatas, rakyat berada di bawah intimidasi dan diperas semata. Monarki semacam ini cepat atau lambat pasti akan digulingkan oleh rakyat. Sebaliknya, hampir dua setengah abad Kasultanan berdiri, rakyat tetap setia memberi dukungan dan pengabdian kepada raja mereka.

Ungkapan *manunggaling kawulo gusti* merupakan prinsip tentang kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. Pemimpin berasal dari rakyat dan harus mengabdikan diri hanya untuk kepentingan rakyat. Tahta untuk rakyat. Menurut catatan Purwadi (2007), Sri sultan HB IX adalah seorang yang sangat konsisten memegang prinsip itu. Saat ia menyatakan diri untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Meskipun mantan ketua MPR H. Adam Malik berulang kali merayu supaya ia mau menjadi wapres lagi, Sri Sultan HB IX tetap menolak (Baskoro, 2010:173-175).

Adapun sistem kewarisan Kesultanan Yogyakarta terbagi menjadi dua, kewarisan dalam arti suksesi (*succession*) dan kewarisan dalam arti

keturunan (*inheritance*). Kewarisan ini sangat penting terutama pada kewarisan suksesi. Mengingat Kesultanan Yogyakarta dibangun dengan konstruksi ajaran agama Islam, maka dalam kekerabatan dianut sistem patrilineal. Patrilineal mengatur dan menghitung keturunan berdasarkan garis darah *trah* laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki mewarisi takhta *trah* sebagai pengganti sultan berikutnya.

Proses penobatan atau pergantian kekuasaan bisa terjadi baik secara wajar maupun tidak wajar. Dalam proses yang wajar, seorang pewaris takhta menggantikan ayahnya yang meninggal atau mengundurkan diri. Pergantian seperti ini akan berlangsung lancar secara tradisional dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, salah satunya garis darah dengan raja.

Sementara itu, bisa terjadi kemungkinan pergantian secara tidak wajar melalui perlawanan, pemberontakan atau peperangan bahkan kudeta. Dalam sejarah, Kerajaan Mataram Islam telah mengalami tiga kali perang suksesi, yaitu Perang Suksesi I (1703-1708), Perang Suksesi II (1718-1723), dan Perang Suksesi III yang berakhir dengan perjanjian Giyanti (1746-1755).

C. Surat Kabar

1. Harian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat adalah koran lokal yang berdiri dan berkembang di Yogyakarta, biasa disebut “KR”. Sebagai sebuah merek, *Kedaulatan Rakyat* sangat melekat dengan kultur masyarakat Yogyakarta sehingga

sering kali masyarakat setempat menyebut koran apapun namanya dengan sebutan “KR”. Hal itu menunjukkan bahwa *Kedaulatan Rakyat* merupakan koran penting dan diperhitungkan di Yogyakarta. Selain basis pembaca yang kuat, posisi penting ini juga bisa dilihat dari kiprah wartawan *Kedaulatan Rakyat* yang memegang posisi-posisi kunci dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS).

Kedaulatan Rakyat didirikan HM. Samawi dan M. Wonohito tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 27 September 1945, atau 40 hari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Surat kabar ini berada di daerah, namun mampu bertahan dalam pusaran jaman. Menurut Jacob Utama, sejumlah surat kabar di daerah menunjukkan kestabilan yang lebih kenyal.

HM. Samawi dan H. Madikin Wonohito merupakan figur utama yang mendirikan *Kedaulatan Rakyat*. Sejak awal, *Kedaulatan Rakyat* berkantor di lokasi yang strategis di Yogyakarta, yakni di Jalan Margo Utomo, atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Mngkubumi. Lokasi ini dekat dengan Tugu Yogyakarta, Stasiun Kereta Api Tugu, serta Jalan Malioboro yang menjadi roda utama perekonomian sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Yogyakarta. Kombinasi Samawi dan Madikin Wonohito berhasil membentuk *Kedaulatan Rakyat* sebagai sebuah lembaga, bukan *sekedarnya oneman business* atau Koran perseorangan.

Pada masa awal, *Kedaulatan Rakyat* hanya terbit sebanyak 16 halaman. *Kedaulatan Rakyat* pada perkembangannya mampu bertahan dalam semua era. Pada masa Orde Baru, *Kedaulatan Rakyat* mampu

bertahan dengan berhasil meraup oplah 102.000 eksemplar. Kini di era reformasi, *Kedaulatan Rakyat* masih menjadi koran terkemuka dan menjadi salah satu koran lokal dengan oplah besar, terutama di Yogyakarta. Pembaca *Kedaulatan Rakyat* tidak hanya bisa diukur dari oplah, karena oplah *Kedaulatan Rakyat* belum memperhitungkan seluruh pembaca riil *Kedaulatan Rakyat*. Ini dilatarbelakangi alasan bahwa selain didistribusikan secara langganan maupun eceran, *Kedaulatan Rakyat* juga sering ditempelkan sebagai koran dinding, menjadi bacaan umum di tempat-tempat strategis di area perkampungan atau pedesaan di Yogyakarta, seperti kantor kelurahan, pinggir lapangan, masjid, dan ruang publik lainnya. Dengan demikian, pembaca *Kedaulatan Rakyat* tidak hanya para pelanggan ataupun pembeli, tetapi juga warga yang membaca *Kedaulatan Rakyat* di koran dinding tersebut.

Sebagai koran lokal, *Kedaulatan Rakyat* lebih banyak mengangkat berita tentang perkembangan di Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari rubrikasi *Kedaulatan Rakyat* yang berisi liputan lokal Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulonprogo, Solo, Pantura, Kedu, Banyumas dan Semarang. Porsi rubrikasi liputan lokal lebih banyak daripada Jawa Tengah. Selain itu, ada liputan nasional, pendidikan, ekonomi, olahraga, otomotif, teknologi, wisata, gaya hidup dan remaja melalui rubrik Kaca. *Kedaulatan Rakyat* juga bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui pemagangan mahasiswa untuk mengelola rubrik Swara Kampus. Suplemen ini menjadi media aktualisasi dunia pendidikan

tinggi, dikelola para mahasiswa yang mendapat pembinaan jurnalistik dari wartawan Kedaulatan Rakyat.

Secara umum, gaya pemberitaan Kedaulatan Rakyat mencerminkan tradisi komunikasi orang Jawa. Kedaulatan Rakyat cenderung menghindari berita yang provokatif, dan berprinsip pada lokal wisdom “*migunani tumrap liyan*” (bermanfaat bagi orang lain). Rubrik berbahasa Jawa masih dipertahankan oleh Kedaulatan Rakyat, demikian juga idiom-idiom Jawa dengan mudah ditemukan di halaman-halaman Kedaulatan Rakyat.

2. Harian TribunJogja

Tribun merupakan salah satu pers daerah yang dikelola oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Sebagai salah satu surat kabar daerah milik Kompas Gramedia, Tribun terbit secara harian. Awal kemunculannya, untuk pertama kalinya Tribun daerah terbit di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan sebutan Tribun Kaltim. Penerimaan yang baik di masyarakat membuat Tribun memperluas jaringan ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya.

Sebagai anak perusahaan dari Kelompok Kompas Gramedia, kemasan Tribun daerah termasuk Tribun Jogja tentu tidak dapat dilepaskan dari pendiri Kompas, yaitu Petrus Ojong dan Jakop Oetama. Kompas berdiri pada 28 Juni 1965 dan dipimpin oleh Jakop Oetama hingga hari ini.

Kompas lahir ditengah situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1965. Pada tahun tersebut, Partai Komunis Indonesia (PKI), satu dari empat partai besar pemenang Pemilu 1955 mengusulkan pembentukan angkatan

kelima kepada Presiden Soekarno secara sepihak. Angkatan kelima yang dimaksud merupakan organisasi militer yang berdiri sendiri di luar AD, AL, AU, dan Kepolisian. PKI beralih pembentukan angkatan kelima dapat membantu proses konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat yang bersamaan, PKI juga melakukan pengambilalihan tanah-tanah negara di beberapa daerah.

Situasi ini membuat pemerintah mengusulkan penerbitan surat kabar kepada Partai Katolik yang saat itu diketuai oleh Frans Seda. Penerbitan surat kabar ini banyak mendapat halangan dari PKI namun tetap berhasil terbit. Terbitnya surat kabar ini mendapat izin langsung dari Presiden Soekarno yang didukung oleh Panglima Angkatan Darat Jendral Ahmad Yani.

Pada awalnya, surat kabar yang akan diterbitkan ini bernama Bentara Rakyat yang kemudian atas usul Presiden Soekarno berubah menjadi Kompas. Kompas dalam arti sebagai petunjuk arah. Namun, dalam perkembangannya, nama Kompas sering diplesetkan menjadi Komando Pastor atau Komando Pak Seda. Plesetan ini bisa dilihat dari asal-muasalnya yang memang berafiliasi dengan Partai Katolik. Selain itu, latar belakang PK Ojong dan Jakop Oetama sebagai pendiri Kompas memang kental dengan nuansa Katolik (Hamad, 2004:116).

Dua kali pembredelan, era orde lama dan orde baru. Pada era orde baru awal tahun 1978, Kompas bersama enam surat kabar lainnya, yaitu Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, *The Indonesia Times*, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Pembredelan ini dilakukan oleh pemerintah yang menuding ke tujuh

surat kabar tersebut ikut serta menyebarkan kebencian dan kritik terhadap kepemimpinan Soeharto (Sularto, 2007:73).

Pembredelan ini menimbulkan perbedaan sikap antara PK Ojong dan Jakop Oetama. PK Ojong tetap memegang teguh nilai-nilai kebebasan pers apapun akibatnya. Menurut PK Ojong, pembredelan ini merupakan resiko yang harus dijalani. Menurutnya, Kompas sudah tamat sebagai sebuah surat kabar namun sebagai institusi bisnis PT KKG tetap ada dan menjalankan diversifikasi bisnis untuk menjaga keberlangsungan hidup. Namun Jakob Oetama melihat bahwa masih ada harapan untuk Kompas hidup kembali. Menurutnya, Kompas harus hidup kembali untuk menjaga keberlangsungan bisnis KKG. Perbincangan yang cukup serius ini sering dilakukan keduanya untuk memecahkan persoalan pembredelan ini (Fajri, 2011:59).

Akhirnya, Jakob Oetama dengan penuh tanggung jawab melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pemerintah pada 5 Februari 1978. Jakob Oetama menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan pemerintah pemerintah sebagai syarat penerbitan kembali Kompas sebagai surat kabar. Menurutnya, syarat yang diajukan pemerintah merupakan syarat yang sangat berat dan bertentangan dengan hati nurani dasar media massa. Ada empat syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan Kompas supaya diijinkan kembali terbit (Sularto, 2007:73). Syarat-syarat tersebut antara lain:

- Kompas tidak menulis tentang kekayaan Soeharto dan keluarganya,

- Kompas tidak menulis tentang dwi fungsi ABRI,
- Kompas tidak menulis konflik sosial,
- Kompas tidak menulis tentang isu-isu SARA.

Penandatanganan kesepakatan tersebut memastikan Kompas bisa terbit hingga hari ini.